

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN PNS
YANG DIAJUKAN OLEH KEPALA KUA KEPADA PENGADILAN AGAMA
BONDOWOSO KARENA PERNIKAHAN PALSU YANG DIRENCANAKAN**

(Studi Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw)

SKRIPSI

**OLEH
Fa'idh Duhat
NIM C71214075**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
SURABAYA
2019**

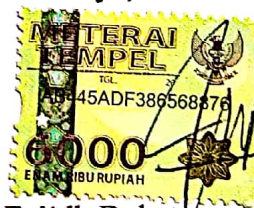
PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fa'idh Duhat
NIM : C71214075
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : Hukum Perdata Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan
PNS Yang Diajukan Oleh Kepala KUA Kepada
Pengadilan Agama Bondowoso karena Pernikahan
Palsu yang Direncanakan (Studi Putusan No.
0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Oktober 2018



Fa'idh Duhat
C71214075

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang ditulis oleh Fa'idh Duhat NIM C71214075 dengan judul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN PNS YANG DIAJUKAN OLEH KEPALA KUA KEPADA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO KARENA PERNIKAHAN PALSU YANG DIRENCANAKAN (Studi Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimuaqosahkan.

Surabaya, 08 Juli 2018

Dosen Pembimbing,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.

NIP. 197211061996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fa'idh Duhat NIM C71214075 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 24 Januari 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



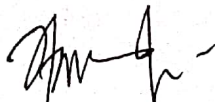
H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag.
NIP. 197211061996031001

Penguji II,



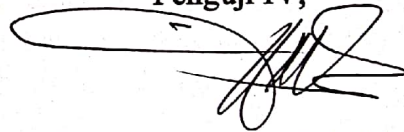
Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag
NIP. 195794231986032001

Penguji III,



Hj. Ifa Mutitul Choirah, SH, M.Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji IV,



Siti Tatmainul Qulub, M.SI
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 29 Januari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Dekan,
Endang Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fa'idh Duhat
NIM : C71214075
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : duhatfaidh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN PNS YANG
DIAJUKAN OLEH KEPALA KUA KEPADA PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO
KARENA PERNIKAHAN PALSU YANG DIRENCANAKAN (STUDI PUTUSAN NO.
0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Januari 2019

Penulis

(Fa'idh Duhat)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Perkawinan PNS yang Diajukan Oleh Kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena Pernikahan Palsu yang Direncanakan (Studi Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw).” ini merupakan hasil penelitian perpustakaan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso (putusan perkara No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw). Bagaimana analisis yuridis terhadap pembatalan perkawinan yang diajukan oleh kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso (putusan perkara No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw).

Dari rumusan masalah di atas teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Selanjutnya data tersebut dianalisis penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis ini menggambarkan dan menafsirkan data yang telah terkumpul dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu proses pembahasan yang berasal dari ketentuan yang bersifat mengarah pada proses berpikir yang bertolak dari suatu proposisi baru yang membentuk suatu kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian bahwa putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw terhadap pembatalan perkawinan PNS yang diajukan oleh kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena pernikahan palsu yang direncanakan adalah kurang tepat. Dalam perkara ini majelis hakim berpendapat bahwa kedua termohon telah merencanakan pemalsuan identitas status perkawinan, sehingga perkawinan tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam untuk melakukan pembatalan pernikahan. Seharusnya dalam putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw majelis hakim menggunakan Pasal 22 karena dalam pasal tersebut menjelaskan perkawinan dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan.

Kesimpulan dari penelitian ini menyarankan kepada majelis hakim lebih teliti dalam menggunakan pasal dalam memutuskan suatu perkara, dan juga kepada kepala KUA agar lebih cermat dalam mengamati berkas pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	
A. Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	18
2. Dasar Hukum Perkawinan	20
3. Syarat Perkawinan	21
4. Tata cara Pendaftaran Perkawinan	23
B. Pembatalan Perkawinan	
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	27
2. Prosedur Pembatalan Perkawinan	29

Berdasarkan firman Allah SWT seperti yang tertuang pada surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁴

Begitu pentingnya makna dari tujuan perkawinan, oleh karena itu syarat dan rukun perkawinan harus terpenuhi. Seperti yang termuat pada pasal 6-12 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta pada pasal 14-18 Kompilasi Hukum Islam. Adapun jika tidak terpenuhi salah satu rukun dan syarat perkawinan maka perkawinan itu dinyatakan *fasakh* atau batal.

Maksud dari *fasakh nikah* adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri. *Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat ketika berlangsung akad nikah atau karena hal-hal yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.⁵

Selain itu, pembatalan perkawinan adalah sebagai salah satu upaya pemutusan hubungan perkawinan yang menjadi wewenang dan tanggung

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UI Press, 2000), 86.

⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah* (Semarang: CV. Penerbit JART), 406.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 195-196

Disamping sebagai upaya badan peradilan, pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah *no legal force or declared void*. Sesuatu yang dinyatakan *no legal force* : maka keadaan itu dianggap tidak pernah ada, oleh karena itu si laki-laki dan si perempuan yang dibatalkan perkawinannya dianggap tidak pernah kawin sebagai suami istri.⁷

Adapun undang-undang yang mengatur didalamnya Pasal 22 UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan dengan tegas: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Medan: CV. Zahir Tranding Co, 1978), 71.

terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.⁸

Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai perkawinan yang dapat dibatalkan sebagaimana yang termuat dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 22 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan dapat dibatalkannya perkawinan dengan alasan yaitu, “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Sedangkan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dapat dibatalkannya perkawinan karena :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami yang lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Salah satu alasan yang dapat dibataalkannya perkawinan adalah ketika seorang suami melakukan poligami tanpa izin, hal ini terjadi dikehidupan masyarakat, apalagi jika seorang suami berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang diharuskan mematuhi aturan yang termuat dalam peraturan pemerintah tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Nomor 10 Tahun 1983. Dalam hal ini dijelaskan pada pasal 4 ayat

⁸ Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 25.

(1) bahwa pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Begitu rumitnya proses administrasi yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu beberapa PNS yang hendak melakukan poligami mengambil jalan pintas melalui cara yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 diantaranya adalah pemalsuan identitas.

Sebagaimana kasus di Pengadilan Agama Bondowoso yang tertuang dalam putusan Nomor 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw dimana dalam perkara tersebut diuraikan tentang pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam perkawinan PNS, bahwa selama pernikahan Termohon I dan Termohon II telah merencanakan pernikahan dengan memalsukan identitas status dan juga mengelabui petugas pencatatan nikah. Setelah satu tahun berselang hal ini diketahui Kepala KUA Bondowoso oleh karena itu Kepala KUA Bondowoso mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Bondowoso dengan maksud agar status perkawinan suami yang disebut sebagai Termohon I dengan Istri yang disebut sebagai Termohon II dibatalkan dan sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh Kepala KUA Kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena Pernikahan Palsu yang Direncanakan (Studi Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw).”

- [illegible]

Adapun penelitian yang akan dibahas oleh penulis “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh Kepala KUA Kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena Pernikahan Palsu yang Direncanakan (Studi Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw).” dari semua yang sudah dibahas penulis belum menemukan hukum atau peraturan yang membicarakan pembatalan perkawinan PNS yang diajukan oleh kepala KUA.

dan juga skripsi yang akan penulis bahas belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah, maka tujuan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis tentang pembatalan perkawinan PNS yang diajukan kepala KUA perkara No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw

F. Kegunaan Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu :

1. Secara teori, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan informasi dalam penemuan hukum, agar dapat memperluas cakrawala pemikiran dan khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan faktor yang mendasari dasar hukum Hakim dalam memutus perkara ini dan implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengertian tentang tata cara pembatalan pernikahan yang sebenarnya untuk pegawai negeri sipil terkait instansi pemerintah seperti yang diatur dalam PP no 10 tahun 1983 dan PP no 40 tahun 1990 tentang Pernikahan Pegawai Negeri Sipil.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya salah pengertian terhadap judul penelitian skripsi ini, yaitu “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS Oleh Kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena Pernikahan Palsu yang Direncanakan (Studi Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw)”, perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul di atas :

Analisis yuridis : Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁰ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 60.

Jadi yang di maksud dalam judul yang penulis angkat ini adalah tentang “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan PNS Yang Diajukan Oleh Kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena Pernikahan Palsu yang Direncanakan.”

¹² Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia), 28.

merupakan data yang bersumber dari buku-buku tentang perkawinan, pembatalan perkawinan dan catatan perundang undangan yaitu Undang Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintahan No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, 2010 serta wawancara kepada Bpk. Moh. Rasid, SH sebagai majelis hakim dalam Putusan Nomor: 0337/Pdt.G/2013/Pa.Bdw.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tersebut, maka perlu digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Dokumentasi, yaitu dengan teknik dokumentasi peneliti menyelidiki benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.¹⁵ Dalam penelitian ini mengumpulkan dokumen kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso terkait putusan Nomor: 0337/Pdt.G/2013/Pa.Bdw, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, UU No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dari hasil pengumpulan dokumentasi yang telah diperoleh peneliti ini, guna memperoleh data primer dan sekunder, maupun dokumen lain yang dapat dimanfaatkan oleh peneliti.
- b. Wawancara, yaitu sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk menggali suatu informasi dari salah seorang narasumber secara

¹⁵ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

langsung.¹⁶ Dalam penelitian ini akan menggali informasi dengan wawancara kepada Bpk. Moh. Rasid, SH sebagai hakim dalam Putusan Nomor: 0337/Pdt.G/2013/Pa.Bdw.

4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang di peroleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.¹⁷
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh.¹⁸

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari sehingga dapat

¹⁶ Agusti Muhsy Maghribi, "Teknik Wawancara yang Baik dan Benar dalam Penelitian Jurnalistik", <http://satujam.com/teknik-wawancara-yang-baik/>, "diakses pada" 17 Maret 2018.

¹⁷ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

¹⁸ *Ibid.*, 154.

Bab dua tentang landasan teori yang meliputi pengertian Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Prosedur Pembatalan Perkawinan dan Akibat Pembatalan Perkawinan.

Bab tiga merupakan, hasil penelitian atau data penelitian yang berisi: sekilas tentang Pengadilan Agama Bondowoso, Putusan Pengadilan Agama Bondowoso No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw. tentang Pembatalan Perkawinan PNS, dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Pembatalan Perkawinan PNS putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw.

Selanjutnya bab empat yang berisi analisis data yaitu, analisis pertimbangan hukum hakim terhadap pembatalan pernikahan dalam Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw dan analisis yuridis terhadap pembatalan Perkawinan dalam Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw.

Skripsi ini diakhiri dengan bab lima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Islam adalah suatu perjanjian antara mempelai lelaki disatu pihak dan wali dari mempelai perempuan di pihak lain, yang mana si wali menyatakan pemasrahannya (*ījāb*) yang disusul oleh pernyataan penerimaan (*qabūl*) bakal suami, dan disaksikan oleh dua orang saksi.²

Dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Seorang perempuan dan seorang laki-laki harus ada kata sepakat untuk melakukan perkawinan. Hal ini berarti bahwa setelah ada kesepakatan,

² Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Amico, 1985), 123.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Kompilasi Hukum Islam adalah salah satu sumber rujukan yang dipegang para Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa memutuskan suatu perkara. Sedangkan Perkawinan menurut Pasal 2 KHI. “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁴

³ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1981), 8.
⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Putra Grafika, 2009), 40.
⁵ Wacana Intelektual, *Undang-undang Perkawinan Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: WILPRESS, 2007), 95.

Syarat adalah hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”.⁷

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Syarat perkawinan ialah syarat yang berhubungan dengan rukun perkawinan, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

Adapun syarat-syarat sah perkawinan secara rinci, yaitu :

a. Syarat calon pengantin pria :

Beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, sebagai berikut:

⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 3-4.

⁷ Djubaedah Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 92.

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikan istri, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Tata cara pendaftaran perkawinan ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh calon mempelai, sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan di lembaga pencatatan perkawinan, adapun berkas yang diperlukan dalam pendaftaran nikah di KUA, yaitu sebagai berikut :

- [illegible]

- Proses pengurusan surat nikah ke KUA, harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- [illegible]

- diserahkan ke pihak calon istri.
- b. Lampiran
- 1) Fotokopi KTP.
 - 2) Akte kelahiran & C1 (Kartu KK).
 - 3) Pas foto 3x4 = 2 lembar, jika calon istri luar daerah.
 - 4) Pas foto 2x3 = 5 lembar, jika calon istri sedaerah/kecamatan.
- c. Dokumen yang diperlukan calon mempelai wanita
- 1) Pengantar RT-RW dibawa ke kelurahan setempat mendapatkan Isian Blangko N1, N2, N3 & N4.
 - 2) Datang ke KUA setempat untuk mendaftarkan nika

- 7) Izin atasan bagi anggota TNI/ POLRI
 - 8) Surat keterangan kematian ayah bila sudah meninggal
 - 9) Surat keterangan wali jika wali tidak setempat
 - 10) Dispensasi camat bila kurang dari 10 hari
 - 11) N5 (surat izin orang tua) bila usia caten kurang dari 20 tahun
 - 12) N6 (surat kematian suami/istri) bagi janda/duda
- dunia.
- Tata cara perkawinan menurut PP No. 10 Tahun 1990 adalah sebagai berikut :
- 2 yaitu :
- a. Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada

- 7) Izin atasan bagi anggota TNI/ POLRI
- 8) Surat keterangan kematian ayah bila sudah meninggal
- 9) Surat keterangan wali jika wali tidak setempat
- 10) Dispensasi camat bila kurang dari 10 hari
- 11) N5 (surat izin orang tua) bila usia caten kurang dari 20 tahun
- 12) N6 (surat kematian suami/istri) bagi janda/duda

dunia.

Tata cara perkawinan menurut PP No. 10 Tahun 1990 adalah sebagai berikut :

2 yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada

- 7) Izin atasan bagi anggota TNI/ POLRI
 - 8) Surat keterangan kematian ayah bila sudah meninggal
 - 9) Surat keterangan wali jika wali tidak setempat
 - 10) Dispensasi camat bila kurang dari 10 hari
 - 11) N5 (surat izin orang tua) bila usia caten kurang dari 20 tahun
 - 12) N6 (surat kematian suami/istri) bagi janda/duda
- dunia.
- Tata cara perkawinan menurut PP No. 10 Tahun 1990 adalah sebagai berikut :
- 2 yaitu :
- a. Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan wajib memberitahukannya secara tertulis kepada

- 7) Izin atasan bagi anggota TNI/ POLRI
- 8) Surat keterangan kematian ayah bila sudah meninggal
- 9) Surat keterangan wali jika wali tidak setempat
- 10) Dispensasi camat bila kurang dari 10 hari
- 11) N5 (surat izin orang tua) bila usia caten kurang dari 20 tahun
- 12) N6 (surat kematian suami/istri) bagi janda/duda.

Tata cara perkawinan menurut PP No. 10 Tahun 1990

2 yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan

wajib memberitahukannya secara tertulis kepada

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), 85.

Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini adalah dapat diartikan jadi relatif *nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan apabila sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena terdapat pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.¹⁸

Perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pengaturan pembatalan perkawinan dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan apabila perkawinan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan.¹⁹ Undang-Undang Perkawinan tidak menjelaskan secara jelas tentang perkawinan batal demi hukum, sedangkan dalam KHI dijelaskan secara rinci dalam pasal 70 bahwa perkawinan batal apabila:²⁰

¹⁸ *Ibid.*

²⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 86.

- Pembatalan perkawinan menurut Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu:
- Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu saudara antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.

- e. Istri adalah saudara kandung atau bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Terkait aturan perkawinan yang dapat dibatalkan oleh Pengadilan UU No. 1 Tahun 1974 telah mengaturnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 24: “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan.”²¹
- b. Pasal 26 Ayat (1): “Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.”²²
- c. Pasal 27 Ayat (1): “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.”²³
- d. Pasal 27 Ayat (2): “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu

²¹ Wacana Intelektual, *Undang-undang Perkawinan Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: WILPRESS, 2007), 9.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, 10

berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.”²⁴

- e. Pasal 27 Ayat (3): “Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan itu setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak memprgunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”²⁵

Pasal 24 dan 26 UU No. 1 Tahun 1974 ini dijelaskan dalam KHI pada Pasal 71 dan 72 yang berbunyi :

- a. Pasal 71
 - 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
 - 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
 - 3) Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa 'iddah dari suami lain.
 - 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974.
 - 5) Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
 - 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.²⁶
- b. Pasal 72
 - 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
 - 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, 193.

Menurut Pasal 28 UUP, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.³⁰ Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

[illegible]

- c. Orang ketiga lainnya, sepanjang mereka memperoleh hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.³¹ Adapun larangan bagi Pegawai Negeri Sipil, menurut pasal 14 PP 45 tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil dilarang Hidup Bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah yang seolah olah merupakan suatu rumah tangga.³²

Sanksi bagi pejabat atau atasan Pegawai Negeri Sipil disebutkan, bahwa yang melanggar ketentuan :

- a. Pasal 5 ayat (2): setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud;

³¹ Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Pasal 37.

³² Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 Pasal 14.

Secara geografis kabupaten Bondowoso adalah sebuah salah satu kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Dikenal dengan sebutan daerah tapal kuda. Ibu kotanya adalah Bondowoso. Kabupaten Bondowoso memiliki luas wilayah 1.560,10 km² yang secara geografis berada pada koordinat antara 113°48'10"- 113°48'26" BT dan 7°50'10" – 7°56'41" LS. Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 0C – 25,10 0C, karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di

sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.

- Sebelah Utara Wilayah Hukum PA Situbondo.
- Sebelah Timur Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Banyuwangi.
- Sebelah Selatan Wilayah Hukum PA Jember.
- Sebelah Barat Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Kraksaan.

Jumlah Penduduk sampai sebanyak 740.291 jiwa terdiri dari : Laki-laki : 361.941 jiwa dan perempuan 378.350 jiwa.³

Wilayah Hukum Yuridis Pengadilan Agama Bondowoso meliputi 23 Kecamatan dengan jumlah desa mencapai 219. Jarak tempuh antara desa dengan kantor Pengadilan Agama Bondowoso antara 1Km sampai dengan 20 Km lebih. Dengan ongkos pemanggilan radius I (Rp.75.000,-), radius II (Rp.95.000,-) dan radius III (Rp.115.000,-) ditentukan ketua pengadilan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Nomor : 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw. tanggal 27 Mei 2013.

Adapun wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bondowso kelas 1 B yaitu :

1. Kecamatan Bondowoso terdiri dari 11 desa.
2. Kecamatan Tenggarang terdiri dari 12 desa.
3. Kecamatan Wonosari terdiri dari 12 desa.
4. Kecamatan Tapen terdiri dari 9 desa.
5. Kecamatan Klabang terdiri dari 11 desa.

³ Data Statistik Kabupaten Bondowoso Tahun 2009.

- ## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bondowoso

sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Ketua : Drs. H. THABRANI, S.H., M.H.
- b. Wakil ketua : Drs. AMINUDDIN
- c. Hakim : - HARUN JP, S,Ag.,M.H.I
- Drs. H. Imam Khusaini
- Muslich, S.Ag., M.H.
- Drs. Zainul Fatawi, S.H.
- d. Panitera : M. NIDZAM FICKRY, S.H.
- e. Sekertaris : SHOHEH,S.H.
- f. Panmud Hukum : M. Nur Prehantoro, S.H.
- g. Panmud Gugatan : Drs. H. ABD. Rasyid
- h. Panmud Permohonan : UMAR SUKI,S.H.
- i. Kasubag Permohonan, TI dan Pelaporan : Ahmad Arifin Arfan. S.H.I,
M.H.
- j. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : Samina Laela
S.E, S.H
- k. Kasubag Umum dan Kuangan : Zaenul Yusufi. S.H.I
- l. Panitera Pengganti : - Mohammad Arifin Jatmiko Wijayarso , S.H.
- Atik Yuliana, S.H.
- Tri Anita Budi Utama, S.H.
- m. Jurusita Pengganti : - Dwi Fitriani, A.md

- Nur Airin

- Achmad Walif Rizqy, S.H.

n. Staff : Sri Mulyati

B. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Bondowoso tentang Pembatalan Perkawinan PNS yang Diajukan oleh Kepala KUA karena Pernikahan Palsu yang Direncanakan Putusan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara pembatalan nikah. Adapun para pihak yang mengajukan pembatalan nikah yaitu S sebagai Pemohon sedangkan E dan N sebagai Termohon. Berikut ini adalah identitas para pihak yang berperkara dan duduk perkara.

S penggugat 47 tahun, agama Islam, Kepala KUA Kecamatan Bondowoso, bertempat kediaman di Jalan MT. Haryono No. 26 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Melawan E sebagai Termohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Perum Kembang Permai Blok F.15 (H. MOH. QOYYIM, M.Fil.I) Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini dikuasakan kepada: Kuasa Hukum Termohon I, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Matrip, Perumahan Kembang Permai, Blok L-2 Bondowoso, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I. Dan Melawan N sebagai Termohon II, umur 34 tahun, agama

[illegible]

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten / Kota Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 01 Juni 2006, dan bahkan Termohon I sudah mempunyai seorang anak yang bernama MUHAMMAD FAHREL DIMAS.

Adapun pemalsuan status / identitas tersebut diatas dilakukan oleh Termohon I karena adanya desakan dan bujuk rayu dari Termohon II, dimana pada saat itu Termohon II yang telah bercerai dengan mantan suaminya yang bernama YUDHA KRISNAWAN, S.E., telah mengajak Termohon I untuk menikah “sementara” dengan Termohon II, dengan alasan bahwa Termohon II akan segera menceraikan Termohon I lagi, dan kemudian Termohon II akan segera menikah lagi dengan mantan suaminya yaitu YUDHA KRISNAWAN, S.E. Pada awalnya Termohon I tidak mau, karena Termohon I telah mempunyai istri yang sah yang bernama DEWI ROSMAYANI, S.T., dan bahkan sudah mempunyai seorang anak yang bernama MUHAMMAD FAHREL DIMAS. Akan tetapi Termohon II dengan mantan suaminya tersebut tetap membujuk Termohon I untuk segera menikah sementara dengan Termohon II, dan bahkan Termohon II membujuk Termohon I agar supaya kalau istri Termohon I tidak setuju, Termohon I membuat KTP baru saja yang berstatus jejaka, dan atas desakan dan bujuk rayu Termohon II tersebut diatas akhirnya Termohon I meluluskan permintaan Termohon II tersebut. Setelah Termohon I berhasil mengurus surat pindah untuk menikah dengan memakai KTP lama yang sudah diperpanjang lagi dengan status jejaka, kemudian KTP palsu tersebut oleh Termohon I segera diserahkan kepada Termohon II, dan kemudian yang mengurus semua keperluan perkawinan Termohon I dan

Termohon II di KUA Bondowoso tersebut adalah mantan suami Termohon II yang bernama YUDHA KRISNAWAN, S.E. tersebut, dan juga mantan suami Termohon II yang bernama YUDHA KRISNAWAN, S.E. tersebut akhirnya yang menjadi saksi perkawinannya Termohon II tersebut, sehingga hal tersebut semakin meyakinkan lagi bagi Termohon I bahwa perkawinan tersebut hanyalah untuk sementara saja.

Kenyataan sehari setelah terjadinya perkawinan tersebut di atas, Termohon I langsung pulang ke istri dan anak Termohon I di Jakarta tanpa membawa Akta Nikah antara Termohon I dan Termohon II. Kenyataannya selama ini baik sebelum maupun setelah Termohon II menikah dengan Termohon I, suami Termohon II yang bernama YUDHA KRISNAWAN, S.E. tersebut sehari-harinya memang sering bermalam di rumah Termohon II, meskipun YUDHAKRISNAWAN, S.E. tersebut sudah bercerai secara sah dengan Termohon II.

Bahwa, setelah ditunggu satu tahun lebih ternyata Termohon II tidak segera mengajukan cerai terhadap Termohon I seperti yang telah dijanjikan semula, maka Termohon I segera mempertanyakan kepada Termohon II. Dan ketika Termohon I menanyakannya kepada Termohon II, ternyata Termohon II menjawab bahwa Termohon II mau mengajukan permohonan cerai bilamana Termohon I mau memberikan uang kepada Termohon II sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan kalau Termohon I tidak mau memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000.000,- tersebut, Termohon II mengancam akan melaporkan Termohon I kepada pimpinannya, dan juga

Termohon II akan melaporkan Termohon I ke POLDA Jakarta Pusat, dan bahkan Termohon II telah melakukan teror terhadap istri sah Termohon I.

Kenyataan seperti yang dipaparkan tersebut diatas, kemudian pada sekitar bulan Pebruari 2013 Termohon I dengan mengajak saudaranya datang ke Bondowoso untuk memenuhi Termohon II dan sekaligus mencari Kuasa Hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa dirinya tersebut. Setelah Termohon II mengetahui kalau Termohon I sudah memakai Kuasa Hukum maka kemudian pada sekitar bulan Pebruari 2013 itu juga Termohon II telah menghubungi (menelpon) Kuasa hukum Termohon I untuk bermusyawarah, dimana Termohon II telah menentukan sendiri ingin bertemu dengan Kuasa hukum Termohon I di Rumah Makan Lestari yaitu setelah selesai Sholat Magrib. Akan tetapi pada saat Kuasa Hukum Termohon I menunggu Termohon II di Rumah Makan Lestari, kenyataannya yang datang menemui Kuasa Hukum Termohon I adalah mantan suami Termohon II yang bernama YUDHA KRISNAWAN, S.E. sedangkan Termohon II tidak hadir. Akhirnya Termohon I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan kepada KUA Kecamatan Bondowoso untuk membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, karena kenyataannya pelaksanaan perkawinan tersebut mengandung cacat hukum, yang sengaja disembunyikan oleh Termohon I dan Termohon II tersebut; Setelah adanya panggilan sidang pembatalan perkawinan perkara ini, maka Termohon II dan Kuasa Hukumnya menelpon dan meminta Termohon I untuk datang ke Bondowoso untuk mengadakan musyawarah atas masalah tersebut Dan atas undangan

Termohon II tersebut, Termohon I yang diantar oleh saudara dan juga diantar oleh Kuasa Hukumnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 telah hadir untuk melakukan Musyawarah dengan Termohon II yang juga didampingi oleh Kuasa Hukumnya, yaitu bertempat di Kantor Mediator Drs. SONIC PRANOTO, S.H., M.H.

Pada saat pertemuan itu kenyataannya Termohon II telah mengakui secara tegas bahwa sebelum Termohon I dan Termohon II melakukan perkawinan, Termohon II memang benar-benar telah mengetahui status Termohon I yang sudah punya istri dan sudah punya anak. Dan Termohon II juga telah mengakui bahwa adanya pemalsuan identitas Termohon I di dalam Akta Nikah tersebut memang atas kesepakatan Termohon II dan Termohon I. Akan tetapi pada saat pertemuan tersebut Termohon II tetap bersikeras minta biaya kompensasi kepada Termohon I sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga musyawarah/perdamaian tersebut mengalami kegagalan.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, Termohon I memohon dengan sangat kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Setelah Majelis hakim memberi waktu kepada Termohon II, ternyata Termohon II tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis di persidangan, karena dalam persidangan berikutnya Termohon II tidak hadir dipersidangan.

Bahwa, atas jawaban tertulis Termohon I tersebut, Pemohon memberikan tanggapan dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan semua dalil-dalil permohonan Pemohon.
2. Bahwa Termohon I melalui Kuasa Hukumnya telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon terhadap pembatalan perkawinan Termohon I dan Termohon II, untuk itu sudah sepantasnya perkawinan Termohon I dan Termohon II untuk dibatalkan.

Dasar pertimbangan Hakim terhadap Pembatalan nikah karena pemalsuan status adalah pada tahap pembuktian yaitu pengakuan dan keterangan saksi. Namun sebelum memberi keputusan sebagaimana yang tela terlampir pada nomor perkara No: 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw. majlis hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, atas replik secara lisan Pemohon tersebut, Termohon I memberikan tanggapan dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua pernyataan Pemohon baik dalam permohonannya atau dalam replik Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa :

- [illegible]

Dewi Rosmayani kepada Kepala KUA Kecamatan Bondowoso dan mengatakan bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II adalah tidak sah. Saksi bersama keluarga terus mendesak Termohon I karena watak serta perilaku Termohon I tidak seperti biasanya, linglung berfikir hampa, akhirnya Termohon I mengakui bahwa dirinya sudah menikah dan memberikan informasi bahwa dirinya menikah dengan Termohon II dengan status jejaka sedangkan Termohon II berstatus janda cerai. Bahwa saksi mengenal Termohon II bernama Nunus Putri Ferry Sedi yaitu kenal sejak menjadi teman sekolah Termohon I dan Termohon II berasal dari Gresik yang bekerja di Bondowoso. Pada saat saksi melihat register KUA Kecamatan Bondowoso, saksi lupa siapa yang menjadi wali dan saksi-saksinya, saksi hanya mengetahui salah satu saksi perkawinan bernama Yudha Krisnawan yaitu mantan suami Termohon II. Selama menikah antara Termohon I dengan Termohon II tidak dikaruniai anak dan belum bercerai, tetapi Kepala KUA Kecamatan Bondowoso sudah mengajukan pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II. Setelah mengetahui perkawinan Termohon I dengan Termohon II, saksi datang kerumah Termohon II bersama 2 saudara dan mengecek ke KUA Kecamatan Bondowoso, kemudian Termohon II mengatakan "mengapa datang kemari bersama-sama, waktu mau menikah tidak ada yang datang sama sekali, kalau sudah begini jadinya, semua keluarga Ediy datang kerumah saya", sewaktu mengecek tentang saksi-saksi di register KUA Kecamatan Bondowoso, saksi tidak ingat semua,

Saksi 2, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Gresik, bertempat tinggal di Jalan Citarum No. 13 Kelurahan Randuagung, Kecamatan Kebonmas, Kabupaten Gresik, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Kedua Termohon. Saksi baru kenal dengan Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon I sebagai kuasa dari Ediy Rofik yaitu adik kandung saksi dan saksi juga mengenal Termohon II. mengenal Termohon II bernama Nunus Putri Ferry Sedi sejak adik saksi sama-sama SMA karena Termohon II sering kerumah. Saksi mengetahui Termohon I dengan Termohon II menikah dari cerita istri sah Termohon I bernama Dewi Rosmayani. Saksi mengetahui perkawinan Termohon I dengan Termohon II tersebut setelah saksi mengecek kebenaran cerita istri sah Termohon I bernama Dewi Rosmayani setelah Lebaran sekitar bulan Oktober 2011, kemudian bulan Februari 2013 saksi

bersama 2 saudaranya datang ke KUA Kecamatan Bondowoso, ternyata benar dalam register KUA Kecamatan Bondowoso telah terdaftar nama pasangan suami istri Termohon I dengan Termohon II. Termohon I menikah dengan Dewi Rosmayani secara sah pada tahun 2006 dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak dan selama menikah mereka tinggal bersama di Jakarta sampai sekarang Termohon I dan Dewi Rosmayani sama-sama bekerja di Jakarta. Setelah saksi mengetahui Termohon I dengan Termohon II menikah, saksi bersama 2 saudaranya menjelaskan dan menunjukkan buku nikah milik Termohon I dengan istri sah bernama Dewi Romayani kepada Kepala KUA Kecamatan Bondowoso dan mengatakan bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidak sah, setelah saksi mengetahui mereka menikah dengan memalsukan status Termohon I, Termohon I hanya diam dan saksi melihat bahwa bukan watak Termohon I yang saksi lihat pada waktu itu karena Termohon I seperti orang linglung dan pikiran kosong, sedangkan Termohon II selalu menelpon/meneror kepada istri sah Termohon I bernama Dewi Rosmayani agar tidak mengganggu kehidupannya dengan Termohon I. Saksi tidak tahu berapa lama Termohon I dengan Termohon II dan manikah di Bondowoso, Termohon I hanya datang ke Bondowoso setiap 2 bulan sekali karena tugas di Bali dan mampir di Bondowoso, namun singgahnya Termohon I dimanfaatkan oleh Termohon II untuk mau menikahinya. Saksi tidak tahu mengapa Termohon I mau diajak menikah dengan Termohon II di Bondowoso dan tidak memberitahukan kepada

Saksi 3, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS RSUD Gresik, bertempat tinggal di Jalan KH. Ali Irfan RT.01 RW.01 Banjarsari, Manyar, Gresik, saksi 3 tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon. Saksi mengenal Pemohon sebagai Kepala KUA

Kecamatan Bondowoso dan Kuasa Hukum Termohon I sebagai kuasa dari Ediy Rofik yaitu adik kandung saksi dan saksi juga mengenal Termohon II, saksi sebelumnya tidak tahu Termohon I dan Termohon II menikah, saksi mengetahui pernikahan Termohon I dengan Termohon II setelah Lebaran sekitar bulan Oktober 2012 karena istri sah Termohon I bernama Dewi Rosmayani datang bersilaturahmi di rumah orang tua saksi di Gresik, kemudian Dewi menceritakan bahwa Termohon I dan Termohon II sudah menikah di Bondowoso. Termohon I menikah dengan Dewi Rosmayani secara sah pada tahun 2006 dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak dan selama menikah mereka tinggal bersama di Jakarta sampai sekarang Termohon I dan Dewi Rosmayani sama-sama bekerja di Jakarta, tindakan saksi dan keluarga ketika mengetahui Termohon I sudah menikah lagi di Bondowoso saksi tidak langsung bercerita kepada orang tua dan pada bulan Pebruari 2012 saksi bersama 2 saudaranya (Muhammad Nur dan Widiyatul Ilmiyah) datang dan mengecek kebenaran cerita dari Dewi Rosmayani yaitu datang ke KUA Kecamatan Bondowoso, ternyata nama Termohon I dan Termohon II ada di register KUA Kecamatan Bondowoso dan mereka sudah menikah dan memperoleh buku nikah. Setelah saksi mengetahui Termohon I dengan Termohon II menikah, saksi menjelaskan dan menunjukkan buku nikah milik Termohon I dengan istri yang sah bernama Dewi Rosmayani kepada Kepala KUA Kecamatan Bondowoso dan mengatakan bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II tidak sah, kemudian saksi datang

Saksi 4, umur 41 tahun, Agama Islam pekerjaan PNS Kemenag

Bondowoso, bertempat tinggal di Perum Kembang Permai Blok F 15, Desa Kembang, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, saksi 4 sebagai teman dekat termohon I. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kepala KUA Kecamatan Bondowoso dan Kuasa Hukum Termohon I, sebagai Kuasa dari Ediy Rofik dan saksi tidak begitu mengenal Termohon II. Saksi mengenal Termohon I sudah lama karena saksi masih satu daerah (Gresik) dengan keluarga Termohon I, saksi mengetahui Termohon I sudah mempunyai istri bernama Dewi Rosmayani, yang saksi ketahui Termohon I menikah dengan Dewi Rosmayani secara sah pada tahun 2006 dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak dan selama menikah mereka tinggal bersama di Jakarta sampai sekarang Termohon I dan Dewi Romayani sama-sama tinggal di Jakarta. Saksi mengetahui Termohon I dengan Termohon II menikah sejak bulan Januari 2012 setelah saksi mengecek pada Regester KUA Kecamatan Bondowoso, ternyata nama Termohon I dan Termohon II ada di Regester KUA tersebut dan mereka sudah menikah dan memperoleh buku nikah. Setelah saksi mengetahui perkawinan Termohon I dengan Termohon II tersebut, saksi menjelaskan kepada Kepala KUA Kecamatan Bondowoso bahwa prnikahan Termohon I dengan Termohon II adalah cacat hukum, maka perkawinan mereka harus dibatalkan, selanjutnya saksi memberi tahu keluarga Termohon I dengan menelponnya, tanggapan keluarga Termohon I setelah mendapat penjelasan dari saksi ada 3 orang saudara Termohon I datang ke Bondowoso pada bulan Pebruari 2012 dan

Pertimbangan hukum hakim PA Bondowoso No.
0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bondowoso Kabupaten Bondowoso, telah melaksanakan perkawinan para

termohon pada tanggal 18 Desember 2011, dan oleh Pemohon telah dicatat pada Register Akta Nikah Nomor : 0583/007/XII/2011 tertanggal 18 Desember 2011.

Dalam hal ini kepala KUA Bondowoso tidak menyadari akan adanya pemalsuan identitas yang dilakukan suami dan juga kepala KUA tidak menyadari bahwa status suami yang sebenarnya sudah menikah namun dalam berkasnya yaitu dalam KTP suami berstatus jejak. dalam pemeriksaan berkas perkawinan yang dilakukan oleh kepala KUA sesuai dengan pernikahan seperti halnya pernikahan umum yang lain.

Selanjutnya dalam pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat kekeliruan atau pemalsuan, yaitu: Termohon I memalsukan status/identitas dimana dalam surat pengantar nikah tersebut berstatus Jejak ternyata Termohon I adalah berstatus sudah menikah sah dengan wanita lain dan sudah dikaruniai seorang anak. Adapun kesimpulan hakim menentukan pasal tersebut dikarenakan terjadi penipuan dalam hal ini yang dilakukan para termohon terhadap Kepala KUA, dengan didasari perencanaan yang dimana dilakukan sebelum perkawinan, majlis hakim juga berijtihad dengan menentukan pasal 27 ayat (2) yang sebenarnya berkaitan dengan pasal 27 ayat (3) tetapi majlis hakim tidak memutuskan perkara dengan pasal 27 ayat (3). Dikarenakan dalam pasal 27 (3) yang menentukan tenggang waktu masih banyak penafsiran, namun dalam perkawinan yang dilakukan oleh para termohon memang sepatutnya harus dibatalkan karena dalam pernikahan para termohon mengandung unsur

dan P.3, sehingga perkawinan tersebut mengandung unsur penipuan terhadap keadaan diri suami. Pemohon merasa ditipu oleh para termohon, karena itu Majelis hakim menilai jika rumah tangga para termohon tetap di teruskan maka kemadharatan yang akan menimpa keduanya, oleh karena itu untuk menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui pembatalan nikah merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap dipertahankan perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Termohon I dan Termohon II dibatalkan, maka Akta Nikah Nomor: 0583/007/XII/2011 tanggal 18 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Bondowoso, harus dinyatakan tidak berlaku berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Nikah Nomor: 0583/007/XII/2011 tanggal 18 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Bondowoso dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka majelis Hakim menghukum Kepala

Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II dapat dikabulkan.

Seperti pada kasus pembatalan perkawinan dengan Nomor 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw di dalam kasus tersebut Kepala KUA mengajukan gugatan ke PA Bondowoso, karena suaminya istri tersebut telah memalsukan status untuk melakukan pernikahan mereka. Selain itu di perkawinan kedua termohon ini tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan dalam lingkup perkawinan poligami yang telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-undang No. 1 Th 1974 tentang Perkawinan, KHI, dan PP No. 10 Th 1983 tentang izin perkawinan dan Perceraian PNS. Dengan demikian pernikahan tersebut sudah patut untuk dibatalkan.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh penulis dalam bab III, bahwa pertimbangan hukum hakim PA Bondowoso No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw terhadap pembatalan perkawinan karena pernikahan palsu yang direncanakan adalah sebagai berikut: Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, telah melaksanakan perkawinan Termohon I dengan Termohon II pada tanggal 18 Desember 2011, dan oleh Pemohon telah dicatat pada Register Akta Nikah Nomor : 0583/007/XII/2011 tertanggal 18 Desember 2011. Selanjutnya dalam pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat kekeliruan atau pemalsuan, yaitu: Termohon I memalsukan status/identitas dimana dalam surat pengantar nikah tersebut berstatus Jejaka ternyata Termohon I adalah berstatus sudah menikah sah dengan wanita lain dan sudah

Dengan demikian perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pertimbangan para Majelis Hakim yang berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan pembatalan perkawinan sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II dapat dikabulkan.

h. Rosyid, *Wawancara Ketua Majelis Hakim Putusan No.0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw*, Bangil, Mei 2018

Berdasarkan fakta fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpegang pada keterangan saksi dan penggugat, yang tujuannya untuk melindungi kepentingan pemohon/penggugat yang dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang telah di tipu. Maka dari itu, Majelis Hakim berpendapat permohonan pemohon telah telah terbukti melanggar hukum sesuai pasal yang telah disebutkan, sehingga perkawinan antara Termohon I dan Termohon II patut dibatalkan. Dalam hukum acara perdata, pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim adalah merupakan bukti yang sempurna dan merupakan alat bukti yang menentukan.³

Dengan demikian, alasan-alasan yang diajukan telah diperkuat oleh akta nikah, bukti saksi dan berbagai pertimbangan yang ada. Maka Hakim dapat memutuskan pembatalan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II dengan alasan Pemohon merasa ditipu oleh Termohon I dan Termohon II,

[illegible]

Perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Bondowoso ini adalah perbuatan penipuan dengan cara pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon I dan direncanakan oleh Termohon I dan Termohon II yang didalam penipuan ini didasari maksud dan tujuan tertentu untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain.

Dalam perkawinan telah diatur rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dalam pasal 6-12 dalam undang-undang tersebut dan juga dalam KHI pasal 14. Dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 22 menyebutkan “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan”. Dan dalam pasal 23 (c) yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.⁵

Disebutkan juga dalam KHI Pasal 71 bahwasanya pernikahan bisa dibatalkan karena. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a. seorang

⁵ Wacana Intelektual, *Undang-Undang Perkawinan...*, 8.

Dalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Telah disebutkan dalam Pasal 4 (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil. (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis. (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.⁷

Keabsahan perkawinan yang telah dilakukan sebelum pembatalan perkawinan, erat kaitannya dengan status/identitas setelah pembatalan

7 <http://fp.ub.ac.id/kepegawaian/wp-content/uploads/2012/06/PP-10-1983.pdf> diakses pada 28 Mei 2018.

kemadlaratan bagi keduanya, antara pemohon dan termohon. Pemohon merasa sudah tidak mungkin meneruskan perkawinan para termohon yang telah dimulai dengan kebohongan dan penipuan, sehingga pemohon mengajukan gugatan pembatalan perkawinan.

Dari keseluruhan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majlis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan Nomor. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw adalah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dasar pertimbangan hukum yang dijadikan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw menurut penulis kurang tepat namun majlis hakim sudah tepat dalam membatalkan perkawinan para Termohon, karena keadaan perkawinan para Termohon sudah tidak selayaknya perkawinan yang lain dan tidak tinggal serumah dalam perkawinannya, dan perkawinan para termohon tidak memenuhi prosedur perkawinan yang telah diatur dalam undang-undan dan peraturan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis pembatalan perkawinan PNS yang diajukan oleh Kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena perkawinan palsu yang direncanakan No. 0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara tentang pembatalan perkawinan kurang tepat, dengan pasal 27 ayat (2) jo pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal tersebut hakim juga berijtihad dengan pasal tersebut, karena menurut Majelis Hakim pasal 27 ayat (2) juga bertentangan dengan pasal 27 ayat (3), tetapi dalam pasal 27 ayat (3) banyak penafsiran maka dari itu Majelis Hakim memutuskan perkara tidak menggunakan pasal 27 ayat (3). Namun di dalam perkawinannya juga banyak terkandung kemudharatan jika tidak dibatalkan, dan adanya unsur penipuan yang direncanakan dari awal sebelum adanya perkawinan tersebut yang dimana itu menyalahi undang-undang yang ada, menurut penulis kurang tepat dalam memutuskan perkara.
2. Analisis yuridis pembatalan perkawinan PNS yang diajukan oleh kepala KUA kepada Pengadilan Agama Bondowoso karena perkawinan palsu yang direncanakan. Telah melanggar Undang-undang No.1 tahun 1974

Semoga saran dari penulis bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia dan pelaksanaan hukum dimasyarakat.

- [illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademia Pressindo, 2010.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*, Cet. 1. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UI Press, 2000.
- Data Statistik Kabupaten Bondowoso Tahun 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-quran dan Terjemah*. Semarang: CV. Penerbit JART.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta: tp, 2004.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hamami, Taufik. *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Alumni, 2003.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Cet. 13. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Medan: CV. Zahir Tranding Co, 1978.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marwan, M dan Jimmy P. *Kamus Hukum: Reality Publisher*. Surabaya, t.p, 2009.

- Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nasution, Bahder Johan, et.al. *Hukum Perdata Islam (Kompetensi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqoh)*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Nuruddin, Amir, et.al. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1. Jakarta: Kencana, 2004.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor: 45 Tahun 1990.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rosyidi, Muchtar. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Amico, 1985.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2010.
- Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 3. Jakarta: Putra Grafika, 2009.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.
- Triwulan, Titik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana 2010.
- Wacana Intelektual. *Undang-undang Perkawinan Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: WILPRESS, 2007.
- Wasito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian – Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 1992.
- <http://ahmad-fauzii.blogspot.co.id/2013/01/gharar-ketidakpastian-dalam-asuransi.html?m=1> diakses tanggal 23 Mei 2018.
- <http://fp.ub.ac.id/kepegawaian/wp-content/uploads/2012/06/PP-10-1983.pdf> diakses pada 28 Mei 2018.
- Maghribi, Agusti Muhsy. “Teknik Wawancara yang Baik dan Benar dalam Penelitian Jurnalistik”, <http://satujam.com/teknik-wawancara-yang-baik/>. “diakses pada” 17 Maret 2018.
- Rosyid, Moh. *Wawancara Ketua Majelis Hakim Putusan No.0337/Pdt.G/2013/PA.Bdw*. Bangil, 08 Mei 2018.